

Implementasi Kerjasama Bidang Pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia

Harun Al Ihsan¹, Nurliah Nurdin², Firman Hadi Rivai³

STIA LAN Jakarta

harun.2044021008@stialan.ac.id¹, nurliahnurdin@stialan.ac.id²,
firmanhadi@stialan.ac.id³

Abstract

Education is an important aspect in the formation and development of human resources of the National Police. Cooperation in the field of education is expected to strengthen the capacity and competence of National Police personnel to carry out their duties better. The purpose of this study is to analyze the causes of the non-optimal implementation of cooperation in the field of education in the Human Resources Staff Unit of the National Police of the Republic of Indonesia and formulate optimization of the implementation of cooperation in the field of education in the Human Resources Staff Work Unit of the National Police of the Republic of Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study method. The data collection techniques used in this study were through interviews, document review, and triangulation. The key informant criteria in this study are members of the National Police of the Republic of Indonesia and / or Civil Servants as many as 7 (seven) informants. The results showed that the causes of the non-optimal implementation of educational cooperation programs in the Human Resources Staff Unit of the Indonesian National Police involve several factors, especially budget limitations, lack of coordination between related agencies, and not optimal use of information technology. Budget limitations create obstacles in providing scholarships and limit the reach of the program. Lack of coordination between agencies can result in redundancy and lack of optimization of planning. Suboptimal utilization of information technology can also hamper operational efficiency and program implementation. Efforts that can be formulated to optimize the implementation of cooperation in the field of education in the Human Resources Staff Unit of the Indonesian National Police, namely by improving fund management by diversifying funding sources, improving coordination between related agencies, and utilizing information technology more effectively. By improving financial management, improving coordination, and utilizing information technology, the Indonesian National Police Human Resources Staff Unit and its educational partners can achieve optimization of the implementation of educational cooperation.

Keywords: Implementation of Education Cooperation, Human Resource Management, Police Education Cooperation

Abstrak

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia Polri. Kerjasama dalam bidang pendidikan diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kompetensi personel Polri untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pada bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia serta merumuskan optimalisasi pelaksanaan kerjasama pada bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, telaah dokumen, dan triangulasi. Adapun kriteria key informan dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 (tujuh) informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab belum optimalnya pelaksanaan program kerjasama pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia melibatkan beberapa faktor, terutama keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi terkait,

dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Keterbatasan anggaran menciptakan kendala dalam menyediakan beasiswa dan membatasi jangkauan program. Kurangnya koordinasi antar instansi dapat mengakibatkan redundansi dan kurangnya optimalisasi perencanaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal juga dapat menghambat efisiensi operasional dan implementasi program. Upaya yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama pada bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dengan meningkatkan pengelolaan dana dengan cara diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi secara lebih efektif. Dengan memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan koordinasi, dan memanfaatkan teknologi informasi, Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mitra pendidikannya dapat mencapai optimalisasi pelaksanaan kerjasama pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Kerjasama Pendidikan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kerjasama Pendidikan Polri.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi penghormatan terhadap hukum, pemeliharaan ketertiban dan keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan ketentraman masyarakat dengan menjaga hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Polri bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi serta melayani masyarakat guna memelihara keamanan negeri (Arif, 2021). Polri berusaha mencapai keamanan dalam negeri dengan menghormati hukum, menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat, serta menjaga ketentraman masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengawasi operasional kepolisian dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil. Tantangan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin kompleks, membutuhkan personil berkompeten (Handoko dan Kardian, 2023, p. 7). Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Polri sangat diperlukan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Polri, Pimpinan Polri membuat kebijakan pendidikan. Kapolri bertugas sebagai aparatur negara yang akhirnya bertanggung jawab pada rakyat. SDM yang berkualitas sangat penting. Melalui pengalokasian sumber daya manusia Polri untuk pendidikan yang baik, kemampuan SDM Polri akan berkembang relevan. Pendidikan investasi ini diharapkan hasil optimal dengan menciptakan SDM Polri yang berkompetensi dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah bentuk kegiatan yang diupayakan oleh organisasi dengan tujuan peningkatan sikap, keterampilan dan kecakapan pegawai dan/atau karyawan dalam organisasinya demi mencapai peningkatan kinerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardjo (Lufitasari et.al, 2020, p.258) bahwa *“states that the quality of Human resources is not seen from the physical, but also in terms Of education, experience, and the maturity of individual attitudes In the company environment”*. Artinya bahwa kualitas sumber Daya manusia tidak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi juga dari Segi pendidikan, pengalaman, dan kematangan.

Pendidikan dianggap penting untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas (Solong, 2020). Secara umum tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan efisiensi peralatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan nasional. Dari segi kualitas pelayanan, untuk meningkatkan perlu diberikan pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang bermutu tinggi sesuai standar pelayanan.

Kerjasama pendidikan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perguruan Tinggi berlangsung sejak tahun 2009. Program beasiswa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perguruan Tinggi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan anggota memperoleh pendidikan berkualitas untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini belum optimalnya kerjasama pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebabkan banyak anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang belum mengetahui adanya kerjasama pendidikan. Kerjasama ini memberikan keuntungan bagi institusi Polri seperti anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti pendidikan S1/S2/S3 dengan program beasiswa dan mendapatkan kemudahan dalam pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan. Kerjasama ini juga menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta peningkatan profesionalisme SDM Polri.

KAJIAN LITERATUR

Pengembangan Kerjasama Bidang Pendidikan

Pengembangan kerjasama bidang pendidikan telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas pendidikan di berbagai level. Kerjasama antara lembaga pendidikan, organisasi, dan individu memainkan peran penting dalam meningkatkan hasil pendidikan.

Pengembangan kerjasama bidang pendidikan merupakan langkah strategis yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri (Heri, 2019). Kerjasama ini dilakukan dengan berbagai pihak, seperti:

1. Institusi pendidikan, mencakup perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga pelatihan.
2. Pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan lain-lain.
3. Swasta, mencakup perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain.
4. Lembaga internasional, mencakup Interpol, ASEANAPOL, dan lain-lain.

Bentuk kerjasama pendidikan yang dapat dilakukan yaitu pemberian beasiswa kepada anggota Polri untuk melanjutkan studi di institusi pendidikan lain, pelaksanaan penelitian bersama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, pertukaran dosen dan instruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri serta penyelenggaraan seminar dan konferensi untuk membahas isu-isu terkini terkait kepolisian.

Pengembangan kerjasama bidang pendidikan diharapkan dapat membantu Polri dalam meningkatkan kompetensi anggota Polri dalam berbagai bidang, mengembangkan keahlian anggota Polri yang sesuai dengan kebutuhan zaman, membangun jaringan dengan institusi pendidikan lain dan meningkatkan citra Polri di mata masyarakat. Pengembangan kerjasama bidang pendidikan merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan kerjasama yang efektif, mutu pendidikan di Polri dapat ditingkatkan dan profesionalisme SDM Polri dapat diperkuat sehingga Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan mewujudkan visi misinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Peran Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pendidikan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas (Nurnaningsih, 2023). Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pendidikan sangat penting dan signifikan. Sumber daya manusia dalam konteks pendidikan merujuk pada individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam pendidikan, SDM memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka berkontribusi pada pengembangan kurikulum, pengajaran, dan evaluasi, serta dalam pengelolaan sumber daya pendidikan lainnya. SDM juga berperan dalam mengembangkan sistem evaluasi yang efektif, memantau kemajuan peserta didik, dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peran SDM dalam pendidikan telah ditemukan memiliki dampak yang signifikan pada kualitas pendidikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Agustina, et al., (2022) menunjukkan bahwa SDM sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan ODP Sekertariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM sangat efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan kemampuan dan motivasi staf.

Dalam sintesis, peran Sumber Daya Manusia dalam pendidikan sangat penting dan signifikan. Mereka berperan sebagai penggerak dan pengembang sistem pendidikan, serta sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, SDM memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Implementasi Kerjasama Bidang Pendidikan di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Implementasi Kerjasama Bidang Pendidikan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dilakukan melalui beberapa kerjasama dengan institusi pendidikan. Beberapa contoh implementasi kerjasama tersebut:

1. Kerjasama dengan Universitas Andalas (UNAND)
Polri telah melakukan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan UNAND, yang meliputi penyiapan sumber daya manusia dengan berbagai skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja.

2. Kerjasama dengan TNI AD
Polri telah melakukan penandatanganan kerjasama pendidikan integrasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara pendidikan Polri dan TNI AD, serta untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dalam berbagai tingkat, mulai dari Perwira Pertama hingga Tamtama.
3. Kerjasama dengan Universitas Halu Oleo (UHO)
Polri telah melakukan penandatanganan kerjasama sektor pendidikan dengan UHO. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja, serta untuk mengubah perspektif negatif mahasiswa terhadap TNI dan Polri.
4. Kerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Polri telah melakukan penandatanganan kerjasama tentang pendidikan dan pelatihan dengan BP2MI. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil BP2MI.
5. Kerjasama dengan Universitas Riau (UNRI)
Polri telah melakukan penandatanganan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan UNRI. Kerjasama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, serta program pendidikan vokasi, profesi, sarjana, magister, dan Doktor.

Dalam beberapa kerjasama ini, Polri telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja. Kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara pendidikan Polri dengan institusi pendidikan lainnya, serta untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dalam berbagai tingkat dan bidang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara dan langkah yang digunakan dalam mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis data dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Studi kasus adalah rancangan penelitian yang menganalisis kasus secara detail, mengumpulkan informasi lengkap menggunakan metode pengumpulan data, untuk memperoleh analisis yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti (Assyakurrohim, et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk memahami secara terperinci implementasi kerjasama pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada bentuk dan mekanisme kerjasama pendidikan di SSDM Polri, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kerjasama pendidikan di SSDM Polri serta dampak kerjasama pendidikan terhadap pengembangan SDM Polri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, telaah dokumen, dan triangulasi. Adapun kriteria key informan dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 (tujuh) informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pusat dengan Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri. Visi, Misi, dan Tujuan Staf Sumber Daya Manusia Polri (Staf SDM Polri) adalah sebagai pengawas dan pendukung utama Polri. Tujuannya adalah mengelola aspek-aspek manajemen terkait pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan personil. Posisi Staf SDM Polri sebagai kunci sukses organisasi. Kualitas dan ketersediaan SDM penting dalam mendukung Polri sebagai badan publik yang berkomitmen pada perlindungan dan pelayanan masyarakat. Teknologi berkembang, namun peran SDM di kepolisian tetap tidak tergantikan dan krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Visi dan misi SSDM Polri 2020-2024 sejalan dengan Renstra Polri pada periode tersebut. Visi Polri 2020-2024 adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan tertib. Visi ini akan dicapai dengan melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Salah satu langkah penting dalam menerapkan rencana strategis Polri ke dalam operasional SSDM Polri adalah mengadaptasi visi dan misi tersebut. Hal ini bertujuan agar SSDM Polri dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap pencapaian visi dan kinerja Polri untuk periode 2020-2024.

Visi SSDM Polri: Terwujudnya SDM Polri yang Berkeunggulan. Misi Staf Sumber Daya Manusia Polri adalah tahapan untuk mewujudkan visi Polri. Misi SSDM Polri: 1) Mewujudkan SDM Polri yang berkualitas dan kompetitif. 2) Meningkatkan pelayanan hak yang berkualitas. Tujuan dan sasaran SSDM Polri 2020-2024 adalah penjabaran lebih lanjut dari misi organisasi. Tujuan utama: 1) Meningkatkan profesionalisme SDM Polri. 2) Memastikan keberadaan SDM unggul dalam Polri. 3) Optimalisasi pengembangan, pembinaan, dan pelayanan personel Polri. 4) Terapkan manajemen SDM Polri yang bersih dan transparan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui sasaran strategis yaitu: 1) Profesionalisme SDM. 2) Tersedianya SDM Polri di semua unit/satuan kerja dari pusat hingga daerah. Tersedia kader unggul Polri di semua level. 4) Pengkajian dan formulasi strategi pembinaan SDM Polri. 5) Pembinaan karier personel Polri. 6) Pembinaan dan pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri. 7) Tata Kelola SSDM Polri yang bersih dan transparan. SSDM Polri adalah anggota yang mengawasi dan membantu pimpinan dalam manajemen sumber daya manusia di Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Staf Sumber Daya Manusia Polri membantu Kapolri dalam manajemen SDM, kesejahteraan personel, psikologi kepolisian, dan penilaian kompetensi Polri. Fungsi SSDM Polri meliputi pembinaan SDM, kesejahteraan personel, psikologi kepolisian, dan penilaian kompetensi Polri. Perumusan dan pengkajian kebijakan dan strategi pembangunan serta pengembangan SDM Polri termasuk perencanaan program kerja dan penganggaran di bidang SDM Polri. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan sistem, metode, dan Peraturan Kepolisian untuk fungsi pembinaan SDM Polri serta pengawasan dan pengarahan.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber daya manusianya. Oleh karena itu, telah dibuat kebijakan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan, yang termasuk Didalamnya program kerjasama bidang pendidikan dengan perguruan tinggi Untuk menyediakan program beasiswa S1/S2/S3 bagi SSDM Polri. Kerjasama bidang pendidikan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan perguruan tinggi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber Daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Kerjasama tersebut, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat Memperoleh pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan dan Meningkatkan profesionalismenya.

Program beasiswa dibuat untuk bekerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia polisi. Dengan kerjasama ini, Polri dapat memperoleh pendidikan berkualitas untuk pengembangan dan peningkatan profesionalismenya. Tahapannya meliputi peninjauan potensi kolaborasi, komunikasi aktif antara SSDM Polri dan lembaga pendidikan, dan penentuan kesamaan visi dan nilai. Langkah selanjutnya setelah memahami potensi kerjasama adalah merancang kerangka kerja dan tujuan bersama. Ini melibatkan penyusunan perjanjian kerjasama yang mengatur aspek teknis dan keuangan.

Setelah semua aspek diatur dengan baik, kerjasama pendidikan Polri dapat diterapkan melalui pelatihan dan akses pendidikan anggota Polri. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas anggota Polri serta kualitas SDM di kepolisian. Dalam program kerjasama yang telah dilaksanakan, peneliti menggunakan metode telaah dokumen dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengoptimalkan kerjasama pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri.

Peneliti melakukan wawancara dengan 7 key informan yang terlibat langsung dalam program kerjasama pendidikan, seperti anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang telah dan sedang mengikuti program kerjasama pendidikan, serta pihak lain diluar Polri. Key informan tersebut terdiri dari Kepala Sub Bagian Kebijakan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Bagian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Biro Pengkajian dan Strategi SSDM Polri, Asesor Muda Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karir SSDM Polri, Perwira Urusan Sub Bagian Kebijakan Program Pendidikan Bagian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Biro Pengkajian dan Strategi SSDM Polri, Perwira Administrasi Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Pengkajian dan Strategi SSDM Polri, Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Bagian Seleksi Pendidikan Biro Pengendalian Personil SSDM Polri, Direktur Eksekutif Forum Kerjasama Antar Daerah Mitra Praja Utama, dan Perwira Urusan Sub Bagian Sistem Pembinaan Karir Bagian Pengkajian Sistem Biro Pengkajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kerjasama bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri

Penting memahami dan menerapkan kerjasama dalam rangka meningkatkan efektifitas program kerja pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri melalui sinergi, koordinasi, dan pengembangan program kerja yang berkualitas. Menurut Aryanti dan Setyowati (2018), faktor kesuksesan kerjasama adalah kesamaan pemikiran, keuntungan ekonomi, dan dukungan pemimpin daerah. Namun, faktor penghambatnya adalah keterbatasan dana. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama antara lain kesamaan pemikiran, keuntungan ekonomi, dukungan pemimpin, dan dana.

1. Kesamaan Pemikiran

Kesamaan pemikiran penting dalam peninjauan kerjasama dan mempercepat pengambilan keputusan. Keselarasan ini mengarah pada efisiensi langkah-langkah menuju kerjasama yang produktif. Kesamaan pemikiran penting untuk mengurangi konflik dan mencegah ketidaksepakatan (Rahmandhani & Manafe, 2022). Dengan terciptanya lingkungan kerjasama yang harmonis, konflik dapat diminimalkan untuk mendukung perkembangan kolaborasi Polri dan institusi pendidikan. Kesamaan pemikiran menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kerjasama tersebut. Dalam konteks ini, terlihat adanya keselarasan pandangan tujuan dan sasaran program yang dijalankan, menciptakan dasar yang solid untuk kerja sama yang efektif. Kesamaan pandangan juga mempermudah koordinasi antara Polri dan institusi pendidikan. Koordinasi yang lebih baik adalah hasil langsung dari pemahaman bersama terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Dengan begitu, interaksi antar pihak menjadi lebih baik, mengurangi potensi kesalahpahaman dan hambatan selama kerjasama. Kesesuaian visi dan misi Polri dengan institusi pendidikan mitra memungkinkan integrasi sumber daya dan kegiatan yang efisien. Ada sinergi optimal dalam pemanfaatan aspek yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan sinergi yang lebih kuat, kedua entitas dapat memaksimalkan potensi mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui kerjasama.

Mekanisme koordinasi yang efektif penting untuk mencapai kesamaan pemikiran dalam program kerjasama. Rapat, komunikasi terbuka, dokumentasi jelas, dan evaluasi bersama adalah mekanisme yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Mekanisme koordinasi yang menjadi landasan kokoh untuk mencapai kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan program kerjasama adalah rapat koordinasi rutin. Rapat tersebut memungkinkan para pihak terlibat untuk aktif membahas kemajuan program, mengidentifikasi potensi masalah, dan merayakan pencapaian. Dengan digitalisasi, kerjasama dapat dilakukan melalui email atau panggilan telepon untuk pertukaran informasi yang cepat dan transparan (Sukmawati, et al., 2022). Dokumentasi yang jelas tentang tujuan, rencana, dan tanggung jawab akan menjaga fokus dan konsistensi dalam program. Mengevaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

2. Keuntungan Ekonomi

Program kerjasama bidang pendidikan Polri dan Perguruan Tinggi menghasilkan keuntungan ekonomi yang penting untuk mempertahankan dan memotivasi kolaborasi tersebut. Kerjasama program menghasilkan efisiensi biaya. Keduanya sependapat bahwa kerjasama dapat memungkinkan perancangan strategi bersama untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga biaya lebih efisien. Ada kesamaan

pandangan tentang menghindari duplikasi pembelanjaan yang tidak perlu dengan berbagi sumber daya, seperti fasilitas atau teknologi. Melalui kerjasama ini, efisiensi biaya menjadi nilai tambah yang dapat diakses oleh kedua belah pihak, memberikan dampak positif pada aspek ekonomi implementasi program. Dalam konteks kerjasama, kegiatan bersama dapat membuka peluang untuk berbagi biaya operasional seperti infrastruktur, pelatihan, atau riset.

Dengan pembagian biaya ini, masing-masing pihak dapat mengurangi beban finansialnya, menciptakan atmosfer kerjasama yang saling menguntungkan secara ekonomis. Selain itu, akses yang lebih luas terhadap sumber daya juga menjadi bagian penting keuntungan ekonomi dalam kerjasama. Kolaborasi membuka kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diakses sendiri. Sumber daya yang melibatkan pengetahuan, keahlian, infrastruktur, dan jaringan koneksi yang dimiliki oleh masing-masing pihak memperluas akses dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan serta optimalisasi sumber daya pada SSDM Polri. Peningkatan kualitas pendidikan dapat menguntungkan ekonomi melalui kerjasama dalam berbagi inovasi, metode pengajaran terbaik, dan sumber daya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan menciptakan dampak positif jangka panjang, meningkatkan nilai ekonomi lulusan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kerjasama dengan Polri memberikan keuntungan ekonomis langsung kepada anggotanya. Dukungan Polri dalam pendidikan tinggi memungkinkan anggota untuk kuliah tanpa biaya lebih. Ini memungkinkan mereka mengejar impian akademis tanpa terhambat oleh kendala ekonomi. Dampak ekonomi yang signifikan juga terlihat dari percepatan kenaikan pangkat bagi penerima beasiswa. Bagi anggota Polri yang menerima beasiswa, dukungan finansial selama kuliah membantu mengurangi biaya pendidikan dan mendukung perkembangan karir. Ini juga berdampak pada peningkatan kualitas SSDM Polri dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keuntungan ekonomi adalah pendorong utama dalam menjaga dan meningkatkan kerjasama. Pemahaman akan manfaat ini akan memperkuat komitmen dan kontribusi aktif dalam kerjasama yang terjalin Kerjasama.

3. Dukungan Pemimpin

Dukungan pemimpin dalam institusi kerjasama memiliki dampak signifikan untuk memperkuat komitmen terhadap kesepakatan. Pemimpin bertanggung jawab memastikan sumber daya, termasuk dana, dikelola secara efektif untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan kerjasama. Peran pemimpin dalam menjaga kerjasama sangat penting (Nasir, 2020). Hal ini melibatkan memberikan arahan dan motivasi kepada anggota tim/personel serta memastikan pemenuhan sumber daya yang diperlukan. Pentingnya dukungan kepala instansi terlihat dalam manajemen yang efektif dan efisien sumber daya, termasuk alokasi dana. Pemimpin turut aktif dalam perencanaan anggaran dan memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Dukungan pemimpin tidak hanya pada motivasi, tetapi juga dalam implementasi dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan (Akhmad, et al., 2022). Kepala instansi yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memastikan tepat, tidak hanya menjadi pemimpin inspiratif tetapi juga menjadi katalisator utama kemajuan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan Polri dan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan dan dukungan konkrit dari pemimpin sangat relevan dan kritis dalam pelaksanaan kerjasama pendidikan Polri dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Key Informan 1, pemimpin Polri mendukung kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi. Dukungan ini mencakup kebijakan, alokasi sumber daya, dan dana serta fasilitas untuk pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Pemimpin mendukung Polri untuk fokus belajar di Perguruan Tinggi mitra dengan memberi beasiswa atau status tugas belajar, menunjukkan komitmen dalam mengembangkan kualifikasi dan keterampilan personel melalui kerjasama dengan institusi pendidikan. Dalam konteks lain, Key Informan 2 menyatakan pemimpin memberikan dukungan moril dan pemikiran terhadap keberadaan Asesor Calon Pimpinan (ACP). Pemimpin menggambarkan ACP sebagai tolak ukur kinerja dan profesionalitas Asesor dalam penilaian kompetensi calon pimpinan Polri di masa depan. Dukungan intensif ini mencerminkan upaya pimpinan untuk beradaptasi dengan dinamika organisasi dan memegang nilai-nilai bangga Polri. Dukungan ini menunjukkan keseriusan pemimpin Polri dalam menciptakan lingkungan mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalisme.

Dukungan pemimpin bukan hanya kata-kata, tetapi implementasi nyata dan tanggung jawab terhadap keberhasilan kerjasama. Pemimpin yang menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, berkontribusi signifikan terhadap tujuan, hasil positif, dan kerjasama pendidikan yang optimal. Polri dan Perguruan Tinggi diharapkan berkolaborasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di masyarakat. Pimpinan Polri mendukung kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme anggotanya serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat serta memberikan personel yang siap menghadapi tuntutan masa depan, guna mendukung kegiatan daya yang efektif.

4. Dana

Kendala dana masih menjadi fokus utama dalam kerjasama Polri dan Perguruan Tinggi, terutama bagi beasiswa pendidikan. Diperlukan perhatian lebih pada pengalokasian dan manajemen dana, mengingat dampak signifikan beasiswa pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia Polri. Kendala dana dalam penelitian bisa mencakup alokasi dana yang tidak memadai, distribusi dana yang tidak merata diantara program beasiswa, kurangnya efektivitas pemanfaatan dana. Perlu perbaikan manajemen anggaran untuk optimalisasi program beasiswa pendidikan Polri dan Perguruan Tinggi. Program beasiswa seperti *Eka Tjipta Foundation* meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Dana yang dialokasikan tidak hanya untuk biaya pendidikan, tetapi juga untuk kompetensi dan riset. Meski begitu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti anggaran yang lebih terinci, pemantauan real-time, dan evaluasi berkala untuk efektivitas dan transparansi dalam manajemen dana beasiswa. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu diambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala anggaran tersebut, seperti penyusunan anggaran yang lebih terinci, pemantauan real-time, dan evaluasi berkala dalam penggunaan dana. Dalam beasiswa pendidikan, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dana penting untuk memastikan akses pendidikan yang baik. Perbaikan manajemen keuangan diperlukan untuk mengatasi kendala anggaran. Ini adalah perbaikan berkelanjutan dalam manajemen keuangan untuk memastikan alokasi dana optimal bagi mahasiswa penerima beasiswa. Fokus juga diberikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua mahasiswa. Keempat

dimensi penting dalam konteks kerjasama menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama tidak hanya bergantung pada perjanjian formal, tetapi juga pada kesamaan pemikiran, manfaat ekonomi, dukungan pemimpin, dan pengelolaan dana yang efektif sepanjang proses kerjasama.

Dalam upaya mengatasi hambatan dan memaksimalkan hasil kerjasama di bidang pendidikan, perlu peningkatan pengelolaan aspek-aspek kritis ini oleh Satker SSDM Polri dan mitra pendidikan. Mempersingkat teks, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi meliputi pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan juga strategi penggalangan dana inovatif untuk mendukung program pendidikan. Diperlukan pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan kerjasama dalam proyek pendidikan. Upaya meningkatkan efektivitas kerjasama pendidikan perlu dilakukan dengan menjalin kerjasama erat antara Satker SSDM Polri dan mitra pendidikan guna mencapai tujuan bersama. Memendekkan teks ini tentang keuangan.

Penyebab pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri belum optimal

Peneliti menemukan hal terkait optimalisasi program kerjasama pendidikan di Satker SSDM Polri setelah menelaah dokumen-dokumen dan hasil wawancara dengan key informan. Program kerjasama pendidikan telah dilakukan oleh SSDM Polri dengan beberapa Perguruan Tinggi dengan tahapan perencanaan hingga evaluasi. Masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program kerjasama pendidikan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Ketersediaan kuota beasiswa pendidikan harus sesuai dengan keterbatasan dana. Hal ini dapat mempengaruhi program kerjasama yang tidak optimal.

Keterbatasan anggaran tidak hanya menjadi tantangan finansial, tetapi juga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program kerjasama pendidikan. Dampak jangka panjang dari keterbatasan anggaran ini dirasakan dalam pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pendidikan. Keterbatasan dana menghambat investasi inovasi pendidikan, teknologi, dan pengembangan tenaga pengajar, yang mempengaruhi daya saing dan kualitas lulusan. Mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan keberhasilan program kerjasama pendidikan memerlukan diversifikasi sumber pendanaan, pengelolaan anggaran yang efisien, dan kolaborasi dengan sektor swasta atau pihak donor. Kesulitan dalam sinergi antar lembaga dapat mengakibatkan redundansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Keduplikasian upaya dan kegiatan yang tidak terkoordinasi menyebabkan pemborosan sumber daya, menghambat kemajuan, dan meningkatkan biaya yang seharusnya dapat dihindari. Koordinasi antara Polri dan perguruan tinggi sudah baik meskipun ada masalah dalam perencanaan dan penjadwalan kerjasama yang mengakibatkan penundaan atau bahkan ketidakmungkinan pelaksanaan kerjasama. Kurangnya koordinasi menyebabkan pelaksanaan program pendidikan tidak optimal dan memperlambat pengambilan keputusan vital. Setiap lembaga mungkin memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda, menyebabkan penundaan dalam menetapkan rencana aksi bersama dan menyesuaikan arah program. Keputusan yang lambat dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat, merugikan efisiensi dan efektivitas program secara keseluruhan. Kurangnya koordinasi meningkatkan risiko

konflik kebijakan antara SSDM Polri dan perguruan tinggi mitra, menyebabkan ketidaksepakatan yang merugikan hasil kerjasama. Konflik kebijakan menghambat tujuan bersama, merugikan reputasi dan hubungan lembaga. Tanpa koordinasi yang efektif, sinergi dan kolaborasi tidak terwujud, menghambat pengembangan SDM di kepolisian. Diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, termasuk penyusunan protokol yang jelas, dialog terbuka, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan bersama.

Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam program kerjasama pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri juga menjadi tantangan serius pada berbagai aspek pelaksanaan program. Keterbatasan ini termasuk penggunaan teknologi yang kurang optimal untuk data, pelaporan, dan komunikasi. Membatasi efisiensi administratif, pelaporan yang rumit, dan akses informasi yang penting.

Keterbatasan teknologi informasi berdampak pada anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang tidak mendapatkan info beasiswa. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri menciptakan kesenjangan dalam aksesibilitas pendidikan. Perlunya sosialisasi agar anggota Polri dan PNS Polri mendapatkan informasi tentang beasiswa dari program kerjasama Polri dengan perguruan tinggi. Keberhasilan program pendidikan saat ini bergantung pada teknologi informasi yang efektif, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, manajemen data peserta, dan evaluasi program secara *real-time*. Pemanfaatan teknologi yang suboptimal dapat menghambat kemajuan dan kualitas pembelajaran jarak jauh (Sawir, 2020). Manajemen data yang kurang efektif merugikan evaluasi program, mengurangi kemampuan mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan.

Solusi agar pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia SSDM Polri bisa optimal

Dalam menghadapi tantangan kerjasama pendidikan di SSDM Polri, implementasi solusi-solusi kunci dapat memastikan keberlanjutan dan optimalitas program kerjasama. Keterbatasan dana dapat menjadi penghalang investasi dalam inovasi pendidikan, teknologi, dan pengembangan tenaga pengajar. Dampak keterbatasan ini tidak hanya langsung terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga berdampak luas pada daya saing dan kualitas lulusan. Misalnya, kurangnya dana dapat menghambat penerapan teknologi pendidikan modern, pelatihan tenaga pengajar, dan penyusunan kurikulum inovatif.

Dengan mengidentifikasi kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan solusi strategis holistik. Salah satunya adalah diversifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi keterbatasan dana. Pendekatan diversifikasi sumber pendanaan dapat menciptakan keberlanjutan dalam mendukung pendidikan. Pengelolaan anggaran yang efisien penting dalam mendukung kerjasama bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf SDM Polri. Ini termasuk pemantauan alokasi dana, penyesuaian prioritas, dan pemanfaatan optimal anggaran. Dengan mengelola anggaran secara efisien, setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan di Polri dapat memberikan hasil maksimal tanpa mengorbankan kualitas program. Selain pengawasan alokasi dana, kolaborasi dengan sektor swasta atau pihak donor juga perlu dipertimbangkan. Keterlibatan sektor swasta dapat membuka pintu investasi dan kemitraan yang menguntungkan. Kerjasama dengan pihak donor dapat memberikan sumber daya tambahan dan dukungan finansial yang signifikan. Penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemangku

kepentingan eksternal. Harapannya, keterbatasan anggaran dapat diatasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Solusi ini menciptakan landasan kokoh untuk kelangsungan dan keberhasilan kerjasama pendidikan, dampak yang lebih besar bagi pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan pendidikan secara keseluruhan.

Tanpa koordinasi yang efektif, potensi sinergi dan kolaborasi optimal mungkin tidak terwujud sepenuhnya. Dampaknya signifikan terhadap pengembangan SDM kepolisian. Kerjasama pendidikan terhambat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya konkrit dalam meningkatkan koordinasi antar instansi. Langkah pertama adalah menyusun protokol kerjasama yang jelas dan terstruktur. Protokol ini mencakup panduan langkah-langkah konkret, tanggung jawab masing-masing pihak, dan mekanisme evaluasi teratur. Diharapkan semua pihak terlibat memiliki panduan konsisten dan terperinci dalam kerjasama pendidikan. Pentingnya dialog terbuka adalah elemen yang tak terhindarkan. Dialog rutin dan terarah menciptakan ruang untuk membahas permasalahan, mencari solusi bersama, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam antar instansi. Melalui dialog terbuka, kesulitan dan kendala dalam kerjasama pendidikan dapat diidentifikasi dan diatasi bersama.

Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan bersama juga penting untuk meningkatkan koordinasi. Dengan pemahaman yang jelas, pihak yang terlibat dapat mengarahkan upaya sesuai dengan visi dan misi bersama. Diperlukan pemetaan kebutuhan dan tujuan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait dalam forum terstruktur. Untuk memastikan pelaksanaan kerjasama pendidikan di sektor kepolisian berjalan optimal, dibutuhkan sinergi koordinasi antar instansi.

Langkah-langkah konkret seperti penyusunan protokol, dialog terbuka, dan pemahaman mendalam adalah landasan utama untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor kepolisian. Optimalisasi program beasiswa pendidikan perlu disosialisasikan secara merata kepada anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri untuk meningkatkan efektivitasnya. Penting untuk memberikan informasi komprehensif tentang sumber dana beasiswa dari kerjasama Polri dan perguruan tinggi. Sosialisasi diharapkan memberikan pemahaman kepada anggota Polri dan PNS Polri agar memanfaatkan peluang pendidikan dengan baik. Penyelenggaraan sosialisasi perlu dikelola dengan baik. Materi program beasiswa harus mencakup syarat pendaftaran, seleksi, manfaat, dan tata cara pengajuan.

Penyampaian informasi harus efektif untuk anggota Polri dan PNS Polri. Media massa, seperti email, situs web resmi, atau saluran komunikasi internal, digunakan untuk menyebarkan informasi dengan efisien. Sosialisasi juga bisa dilakukan lewat forum tanya jawab atau diskusi untuk memberikan kesempatan kepada anggota Polri dan PNS Polri untuk klarifikasi dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul. Keterlibatan aktif anggota Polri dan PNS Polri dalam sosialisasi akan memastikan informasi beasiswa disampaikan dengan baik dan jelas. Perlu juga mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih. Pemanfaatan aplikasi seluler, platform daring, atau webinar memungkinkan akses informasi yang fleksibel bagi anggota Polri dan PNS Polri.

Dengan demikian, pesan program beasiswa dapat disampaikan lebih efektif kepada seluruh anggota di berbagai lokasi dan tingkatan. Melalui sosialisasi komprehensif, diharapkan anggota Polri dan PNS Polri sadar akan peluang beasiswa pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mengikutinya. Penyebaran informasi ini akan memajukan potensi pendidikan anggota Polri dan PNS Polri serta mendukung tujuan kerjasama pendidikan Polri dengan perguruan tinggi. Program kerjasama pendidikan adalah kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih institusi pendidikan untuk saling mendukung dan memperluas akses pendidikan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan program kerjasama bidang pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri, terdapat 2 kesimpulan yang dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan pertama adalah terkait dengan dimensi pelaksanaan kerjasama yang meliputi kesamaan pemikiran, keuntungan ekonomi, dukungan pemimpin, dan dana. Kesamaan pemikiran antara SDM Polri dan institusi pendidikan mitra penting untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi konflik. Keuntungan ekonomi juga menjadi motivasi untuk lanjut kerjasama. Dukungan pemimpin, baik dari Staf SDM Polri maupun mitra pendidikan, penting dlm memastikan kelancaran dan keberhasilan program kerjasama pendidikan. Pemimpin memberi dukungan nyata dlm memberi arahan, motivasi, dan mengelola sumber daya dengan baik. Alokasi dana adalah faktor utama dalam program beasiswa pendidikan. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam program kerjasama pendidikan Polri. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Anggaran terbatas menyulitkan pemberian beasiswa & pembatasan program. Kurangnya koordinasi instansi menyebabkan redundansi & kurangnya optimalisasi perencanaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dapat menghambat efisiensi operasional dan implementasi program. Upaya untuk mengoptimalkan kerjasama pendidikan di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri adalah dengan diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan koordinasi instansi terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Dengan memperbaiki manajemen keuangan, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, kerjasama pendidikan antara Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri dan mitra pendidikan dapat dioptimalkan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri harus mencari cara untuk mendiversifikasi sumber pendanaan mengingat keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari sponsor atau mitra potensial dari sektor swasta atau lembaga lainnya yang memiliki minat dalam mendukung pendidikan. Pentingnya koordinasi yang efektif antara Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri dan mitra pendidikan harus ditekankan. Langkah-langkah konkrit seperti pembentukan tim koordinasi atau forum diskusi rutin antara kedua belah pihak dapat membantu dalam mengatasi masalah koordinasi yang ada, memastikan perencanaan dan implementasi program berjalan dengan lancar, serta perlunya dilakukan sosialisasi di lingkungan Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri tentang adanya program kerjasama bidang pendidikan dan program beasiswa pendidikan di beberapa perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P., Wardhani, R. D. A., Gustia, R., Perdana, Y., & Selawati, S. 2022. Peran Sumber Daya manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan ODP Sekertariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 113-122.
- Akhmad, Z., Hasran, H., & Rahman, R. 2022. Pengaruh Kepemimpinan dalam Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Kantor Kecamatan. *Journal of Government Insight*, 2(2), 182-197.
- Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Aryanti, O. F. D., & Setyowati, K. 2018. Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Sangiran. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 2(1), 106-117.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. 2023. Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Handoko, R., dan Kardian, A. R. 2023. Perancangan Aplikasi Penyedia Informasi Tentang Penerimaan Anggota POLRI Berbasis Android. *Jurnal SIKOMTEK*, 13(02), 7-13.
- Heri, E. I. 2019. Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 16.
- Lufitasari, E., Mochklas, M., & Soelistya, D. 2020. Employee Performance PT. Millenium Pharmacon International Tbk: Quality Of Human Resources (HR) And Information Systems Of Millenium Pharmacon International (SIMPI). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 4(03).
- Nasir, M. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Celebes Equilibrium Journal*, 1(02), 1-11.
- Nurnaningsih, A., Norrahman, R. A., & Wibowo, T. S. 2023. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 221-235.
- Ramadhani, Y., & Manafe, L. A. 2022. Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Membina Hubungan Baik Klien Ksp Citra Abadi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 5(1), 243-252.
- Sawir, M. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Solong, H. A. 2020. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukmawati, E., ST, S., Keb, M., Fitriadi, H., Pradana, Y., Dumiyati, M. P., ... &

Kasmanto Rinaldi, S. H. 2022. *Digitalisasi sebagai pengembangan model pembelajaran*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.